



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Gedung Balai Teungku Chik di Tiro, Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh, Aceh 23241, www.pt-nad.go.id, pt.bandaaceh@gmail.com

Nomor : 2097/KPT.W1-U/PW1.1.1/VI/2024 Banda Aceh, 25 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Yth:
Ketua Pengadilan Negeri se-Aceh
Di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, terlampir dikirimkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Kinerja Tahun 2023 pada satuan Kerja Saudara.

Hasil evaluasi ini untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya dengan mempedomani format dalam lampiran IV Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, dan kepada Ketua Pengadilan Negeri segera menyampaikan tindak lanjut hasil evaluasi kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh serta menggunggah dalam aplikasi komdanas menu perencanaan – Dokumen SAKIP – LHE Tahun 2023. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Gedung Balai Teungku Chik di Tiro, Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh, Aceh

Nomor : 2115 /KPT.W1-U/PW1.1.1/VI/2024 Banda Aceh, 25 Juni 2024
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal – hal :

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Banda Aceh memperoleh nilai sebesar **70,5 (BB)** atau **SANGAT BAIK**
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21	21,9
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10	21
3	Pelaporan kinerja	15,00	10,50	10,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15	17,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			66,60 (B)	70,5 (BB)
			BAIK	SANGAT BAIK

No	Catatan
A. PERENCANAAN KINERJA	
1	Pohon kinerja sudah ada namun masih belum sepenuhnya diturunkan berjenjang sesuai level jabatan karena terdapat penurunan pada pejabat Kepaniteraan eselon IV dimasukkan juga Fungsional PP dan JS begitu juga dengan jabatan pada kesekretariatan
2	Dokumen IKU dan Kamus IKU belum sepenuhnya memberikan informasi yang detail untuk periode pengambilan data indikator Indeks Kepuasan Masyarakat serta pada indikator salinan putusan tepat waktu dikirimkan kepada para pihak yang tidak dijelaskan jangka waktu (mulai-akhir) tepat waktu yang dimaksud untuk perkara pidana dan perdata
3	Belum menampilkan eviden SOP yang mendukung seluruh aktivitas dalam pencapaian kinerja
4	SOP bidang Perencanaan yang ditampilkan kurang bisa dipahami karena masih terdapat aktivitas yang kurang dimengerti maksudnya dan penggunaan simbol serta arah untuk alur kegiatan yang tidak tepat atau tidak jelas
5	Kegiatan rapat monev capaian kinerja triwulan tidak diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai
6	Belum terdapat eviden yang menunjukkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pertriwulan sesuai SKP per pegawai
B. PENGUKURAN KINERJA	
1	Dokumen IKU dan Kamus IKU belum sepenuhnya memberikan informasi yang detail untuk periode pengambilan data indikator Indeks Kepuasan Masyarakat serta pada indikator salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu
2	Belum ada SOP Pengumpulan data kinerja per-PK dan pengukuran kinerja yang dapat diandalkan untuk mengukur capaian kinerja
3	Hasil pengukuran kinerja melalui monev berkala sudah mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas kinerja dalam mencapai target kinerja berjalan misalnya sudah dilakukan revisi PKT namun untuk monev SOP belum ada SK Penetapan SOP revisi oleh Ketua
4	Excel pengumpulan data kinerja per PK dan pengukuran capaian kinerja yang ditampilkan belum menunjukkan secara keseluruhan informasi data perkara yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja perindikatornya
C. PELAPORAN KINERJA	
1	Sistematika dan substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) belum sepenuhnya sesuai dengan Lamp. 2 Permenpan 53/2014 yaitu pada judul sub Bab
2	LKjIP telah diformalkan pimpinan dan telah direviu namun terdapat 2 pernyataan reviu dan 2 ceklist reviu pada dokumen LKjIP Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2023
3	Informasi pengukuran capaian kinerja pada indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan seharusnya lebih detail karena pada Satker terdapat prodeo murni dan PHI yang memiliki anggaran masing-masing sehingga informasi data kinerja yang digunakan harus jelas untuk prodeo murni dan PHI
4	Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah karena tidak disertakan dengan informasi

	pencapaian dari target jangka menengah tersebut, selain itu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat belum menginfokan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
5	Dokumen LKjIP belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional
6	Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menginfokan upaya perbaikan ke depan untuk seluruh indikator
7	Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menyajikan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
1	Rapat tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 belum mengikutkan seluruh hakim dan pegawai
2	SOP Monev Akuntabilitas kinerja Internal yang ditampilkan kurang dipahami maksud aktivitasnya
3	Belum ada eviden yang menunjukkan Tim Evaluator melakukan evaluasi pengisian LKE Mandiri melalui SEMAR
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya menunjukkan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
5	Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 sudah ditindaklanjuti namun masih terdapat beberapa dari hasil tindaklanjut yang belum sesuai seperti pohon kinerja
6	Masih terdapat indikator yang tidak tercapai 100 % yaitu indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, perkara prodeo yang diselesaikan dan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

No	Rekomendasi
A. PERENCANAAN KINERJA	
1	Agar setiap dokumen perencanaan kinerja bisa menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Dokumen Renstra, PKT dan SKP harus selaras dengan Pohon Kinerja)
2	Agar Dokumen IKU serta Kamus IKU bisa memberikan informasi yang detail mengenai pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja per indikator sesuai dengan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/II/2022 Tentang Penetapan IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3	Agar menampilkan dokumen aktivitas/SOP secara keseluruhan yang mendukung kinerja yang ingin dicapai
4	Agar SOP bidang Perencanaan yang ada bisa diperbaiki sehingga bisa dipahami maksud dan alur aktivitasnya
5	Agar kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala diikuti oleh unsur pimpinan, hakim dan seluruh pegawai sehingga bisa terlaksana evaluasi dan analisa yang mendalam untuk setiap PK

6	Agar laporan-laporan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dihasilkan bisa sinkron antara satu laporan dengan laporan lainnya
7	Agar dapat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pertriwulan sesuai SKP per pegawai dan dibuktikan dengan data dukung berupa undangan, absen, notulen, foto dan Berita Acara yang memuat segala hambatan/kendala serta rekomendasi
8	Agar eviden yang ditampilkan pada aplikasi SeMAr bisa di- <i>upload</i> dan ditampilkan per judul dokumen atau per- <i>file</i> tidak digabung dalam 1 judul dokumen atau <i>file</i> sehingga membuat eviden sulit dibuka karena ukuran dokumen yang sangat besar
B. PENGUKURAN KINERJA	
1	Agar dokumen IKU dan Kamus IKU dapat memberikan informasi yang detail untuk periode pengambilan data indikator Indeks Kepuasan Masyarakat serta pada indikator salinan putusan pidana dan perdata yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu
2	Agar SOP Pengumpulan data kinerja per PK dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja bisa disusun dengan baik sehingga memiliki mekanisme pengumpulan data yang memadai, yaitu terdapat pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang <i>up to date</i> , sumber data valid dan mudah ditelusuri, data mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggung jawab yang jelas, waktu penerimaannya jelas, dan terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data
3	Agar hasil pengukuran kinerja melalui monev berkala bisa dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas kinerja dalam mencapai target kinerja berjalan seperti penyesuaian aktivitas pada SOP yang dibuktikan dengan data dukung monev SOP dan SK Ketua tentang pemberlakuan SOP revisi
4	Agar form excel pengumpulan data per PK dan pengukuran capaian kinerja yang sudah ada bisa lebih dimanfaatkan dan ditambah fungsinya untuk memberikan kemudahan dan keakuratan dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja per PK
C. PELAPORAN KINERJA	
1	Agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan sistematika dan substansi sesuai dengan Lamp. 2 Permenpan 53/2014
2	Agar pernyataan reuiu dan ceklist reuiu LKjIP yang dilampirkan pada dokumen LKjIP sesuai dengan format SK Sekma nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
3	Agar dokumen LKjIP bisa menyampaikan Informasi pengukuran capaian kinerja yang jelas sumber datanya seperti pada indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan karena pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat prodeo murni dan PHI yang memiliki anggaran masing-masing sehingga informasi data kinerja yang digunakan harus jelas untuk prodeo murni dan PHI
4	Agar dokumen LKjIP bisa menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah disertai dengan informasi perbandingan capaiannya juga
5	Agar pada dokumen LKjIP dapat menambahkan perbandingan kinerja (<i>benchmarking</i>) dapat dilakukan dengan membandingkan data kinerja satker dengan data kinerja seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang datanya telah disediakan oleh tingkat banding

6	Agar pada dokumen LKjIP menginfokan upaya perbaikan ke depan untuk seluruh indikatornya
7	Agar dilakukan analisa efisiensi anggaran dengan membandingkan efisiensi pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja, analisa efisiensi biaya perkara dibandingkan dengan perkara dalam RKAKL, analisa efisiensi Posbakum dengan jumlah orang yang dilayani dibandingkan dengan target orang dilayani dalam RKAKL
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
1	Agar rapat evaluasi atas Laporan Hasil Evaluasi bisa mengikutkan seluruh hakim dan pegawai
2	Agar SOP Monev Akuntabilitas kinerja Internal yang ditampilkan bisa diperbaiki sehingga dapat dimengerti maksud dari aktivitas dan alur SOP nya
3	Agar Tim dalam SK Evaluator Akuntabilitas Kinerja Internal melakukan evaluasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi Mandiri dan dibutikan dengan data dukung lengkap (undangan, absen, notulen dan foto kegiatan)
4	Agar dapat melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai sehingga mampu meningkatkan implementasi SAKIP, peningkatan kinerja maupun dukungan dalam efektifitas dan efisiensi kinerja
5	Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya ditindaklanjuti sebelum penilaian periode tahun ini dimulai (Form sesuai Surat Sekma Nomor 1282/SEK/VII/2023)
6	Agar hasil evaluasi kinerja internal yang telah dilaksanakan dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta penyesuaian target kinerja sehingga diharapkan seluruh target yang telah ditetapkan bisa tercapai

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2023 dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh


SUHARJONO

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Badan pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.